

SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Berita	: Cegah Pungli Dana Hibah, KPK Dilibatkan
Entitas / Cakupan	: Provinsi Jawa Barat
Sumber / Hal	: Pikiran Rakyat/Hal.2
Edisi	: Sabtu, 9 Desember 2017

Cegah Pungli Dana Hibah,

KPK Dilibatkan

BANDUNG, (PR).-

Untuk menghindari pungutan liar dalam pencairan dana hibah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Setiap tahun, anggaran yang dialokasikan untuk dana hibah ini

mencapai ratusan miliar.

Kepala Satgas Koordinasi, Supervisi, dan Pencegahan (Korupsi) Wilayah II KPK RI Asep Rahmat Suwanda mengakui, selalu ada risiko pelanggaran yang cukup besar dalam konteks dana hibah, karena

prosesnya melibatkan banyak pihak. Ia mengaku, kasus "mediator dana hibah" ini pernah terjadi di salah satu wilayah Jawa Barat.

Para mediator ini, kata Asep, melibatkan unsur penyelenggara negara baik eksekutif maupun legislatif, yang mengordinasi proses hibah mulai dari penyusunan proposal hingga membantu kelancaran diterimanya proposal. Asep memastikan setiap tahunnya selalu menerima laporan dugaan kasus seperti ini. Apalagi, kasus hibah selalu menduduki laporan tertinggi.

"Kalau dari sisi Pemprov sudah jelas, pasti sampainya utuh karena via transfer bank, lewat elektronik, enggak mungkinlah di tengah jalan berkurang. Tetapi siapa yang bisa memastikan (dana) itu ketika diambil terus digunakan sesuai proposal. Ketika dicairkan penuh, tapi

dia sisihkan untuk entah siapa itu," kata Asep, di Gedung Sate, Jumat (8/12/2017).

Terkait dengan penghentian sementara penyaluran dana hibah menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada), Asep menuturkan, pihaknya telah melakukan penelitian di tahun 2013 saat dana hibah dan bantuan sosial dihentikan karena ada dugaan digunakan untuk kepentingan politik. Namun dalam konteks tersebut KPK tidak bisa melakukan konfirmasi dan antisipasi korupsi, karena tidak ada pasal korupsi yang melarang hal tersebut.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan, KPK saat ini memiliki seluruh data penerima dana hibah dari Pemerintah Provinsi Jabar. Tak hanya lembaga-lembaga penerima dana hibah, KPK juga memegang data bantuan keuangan ke kabupaten/kota, sehing-

ga seluruh pihak penerima dana tidak bisa macam-macam di bawah pengawasan KPK.

"KPK kan sekarang mengawasi terus. Jadi siapa saja di provinsi yang dapat bantuan, dikasihkan (datanya) ke dia (KPK). Jadi jangan macam-macam, kita tidak tahu mau diapa'in sama KPK," kata dia.

Dengan demikian, kata Heryawan, para penerima dana hibah di Jawa Barat harus berani menolak segala macam bentuk pungutan liar dari pihak mana pun karena dana tersebut sudah jelas peruntukannya yakni untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Masyarakat harus berani. Tidak boleh ada seorang pun yang meminta persentase, tidak ada seorang pun yang harus berterimakasih dengan memberikan sebagian kecilnya kepada mereka," katanya. (Novianti Nurulliah)***